

## Perjuangan Perempuan Kota Tomohon Pada Kontestasi Politik Lokal

Sangputri Sidik<sup>1</sup>, Awaluddin Hasrin<sup>2</sup>, Siti Fathimah<sup>3</sup>, Hamsah<sup>4</sup>, Sanita Carolina Sasea<sup>5</sup>

- <sup>1</sup> Universitas Negeri Manado; [putrisidik@unima.ac.id](mailto:putrisidik@unima.ac.id)  
<sup>2</sup> Universitas Negeri Manado; [awaluddin@unima.ac.id](mailto:awaluddin@unima.ac.id)  
<sup>3</sup> Universitas Negeri Manado; [sitifathimah@unima.ac.id](mailto:sitifathimah@unima.ac.id)  
<sup>4</sup> Universitas Negeri Manado; [hamsah@unima.ac.id](mailto:hamsah@unima.ac.id)  
<sup>5</sup> Universitas Negeri Manado; [sanitasasea@unima.ac.id](mailto:sanitasasea@unima.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Political Participation;  
Women;  
Tomohon City.

---

#### Article history:

Received 2023-03-18  
Revised 2023-03-30  
Accepted 2023-05-03

---

### ABSTRACT

*This research is to explain the form of political participation of women in Tomohon City. The presence of women in the Indonesian political stage is an important discourse on the progress of democracy in Indonesia. However, there are still many obstacles among women to appear in political contestation, especially in political contestation. This research shows that the trend of political participation among women in Tomohon City continues to increase. This can be seen from the presence of female mayoral candidates who ran in the contestation of the 2019 Tomohon City Elections, namely Jilly Gabriel Eman paired with Virgie Baker. In the executive area, there are at least 40% of women who position as members of the Tomohon City Parliament. Meanwhile, in the aspect of election organizers, there are women representatives in the KPU and BAWASLU of Tomohon City. This condition does not necessarily mean that the involvement of women in the world of politics goes smoothly, but there are still obstacles that must be faced by women in participating in the world of politics in Tomohon City. This research also aims to always revive gender discussions in social life. Gender mainstreaming is one of the agendas that must continue to be implemented in various sectors and lines of social life, especially in the academic environment.*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



---

### Corresponding Author:

Sangputri Sidik  
Universitas Negeri Manado; Manado; Indonesia; [putrisidik@unima.ac.id](mailto:putrisidik@unima.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai keterlibatan warga dalam kegiatan politik, seperti pemilihan, kampanye, penggalangan dana, dan pembuatan kebijakan. Partisipasi politik penting bagi pembangunan demokrasi karena memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan ke dalam keputusan politik dan memastikan pemerintah bertanggung jawab pada rakyatnya.

Politik selalu berkaitan dengan kebijakan publik, termasuk yang mempengaruhi masyarakat umum dan warga negara individu (Fransiskus, 2014). Setidaknya dua anggapan mendasari cara berpikir seperti ini. Pertama setiap warga negara individu, bukan seseorang yang berada di luar diri mereka sendiri, tetapi adalah orang yang paling mengenal dirinya sendiri dan sekitarnya. Kedua partisipasi politik selalu berkaitan dengan kebijakan public yang menyangkut masyarakat masyarakat umum maupun secara personal. Karena kebijakan public yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan mempengaruhi hidup masyarakat, maka setiap masyarakat atau individu yang menjadi objek dari kebijakan public tersebut memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan dalam pengambilan keputusan politik atau kebijakan publik. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses politik, dapat dilihat dari bentuk tuntutan pada sistem politik (Setiadi & Kolip, 2013).

Sebuah komunitas berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pemilihan umum, memilih kandidat tertentu untuk pemimpin, membantu proses pemilihan, atau merupakan salah satu pendukung kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan komunitas itu terlibat dalam politik (Iskandar, 2002). Selain itu, mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau PILKADA merupakan cara lain bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik (Schmitt-Beck, 2015). Kemudian, memperjuangkan kepentingan masyarakat ketika menyusun undang-undang pro-kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat umum (Sholikhah, 2014).

Pandangan (Herbet Miclosky) tentang partisipasi politik merupakan kegiatan yang bersifat sukarela dari warga negara, dimana setiap warga negara dapat ikut mengambil bagian dalam proses pemilihan yang ditujukan untuk pembentukan kebijakan umum. Di sisi lain Norman H. Nie dan Sidney verba dalam (Setiadi & Kolip, 2013) mengemukakan, terdapat batasan pada partisipasi politik. Batasan partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang setia yang ditujukan untuk

memengaruhi pemilihan pejabat negara atau merupakan bentuk tindakan yang diambil demi memengaruhi keputusan pemerintah, yaitu upaya untuk mengeksploitasi alokasi otoritatif pada suatu masyarakat.

Sementara itu Rush dan Althoff (Althoff & Rush, 1972) mendefinisikan partisipasi politik sebagai bentuk keterlibatan setiap individu baik laki-laki dan perempuan, pada berbagai tingkatan dalam sistem politik, bentuk partisipasi politik dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Menduduki suatu jabatan politik atau administratif;
2. Mencari jabatan politik atau administratif;
3. Keanggota aktif dalam organisasi politik;
4. Keanggotaan pasif pada suatu organisasi;
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*);
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*);
7. Partisipasi dalam aksi rapat umum, demonstrasi, dan sejenisnya;
8. Partisipasi pada diskusi politik yang bentuknya informal dan memiliki minat umum dalam politik;
9. Pemilih (*pemberian suara*).

Bentuk partisipasi politik yang dijelaskan Rush dan Althoff di atas, memberi ruang kepada kalangan perempuan dalam aktivitas politik. Di Indonesia, perempuan telah berpartisipasi dalam kegiatan politik sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945. Pada pemilihan umum presiden tahun 2014, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen meningkat menjadi sekitar 20%, meskipun masih di bawah rata-rata dunia (Kertati, 2014; Umagapi, 2020). Namun, perempuan di Indonesia masih mengalami hambatan untuk memperoleh hak-hak politik yang sama dengan laki-laki, seperti kesulitan dalam mendapatkan dukungan dan pendanaan politik.

Sementara di dunia, partisipasi politik perempuan telah menjadi perhatian global (Suarmini et al., 2018). Meskipun ada kemajuan, perempuan masih diabaikan dalam politik di banyak negara. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya sekitar 22% anggota parlemen dunia adalah perempuan. Oleh karena itu, upaya global terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, seperti melalui kampanye "HeForShe" dan "Sustainable Development Goals" yang bertujuan

untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN WOMEN USA, n.d.; Unicef, 2015).

Peran perempuan dalam politik sangat penting karena membawa perspektif yang berbeda dan dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ketika perempuan lebih terlibat dalam politik, isu-isu yang penting bagi perempuan, seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perlindungan terhadap kekerasan, akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dan terintegrasi ke dalam kebijakan negara.

Dalam hal partisipasi politik perempuan dan peran perempuan dalam politik di Indonesia dan dunia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam politik dan memastikan bahwa suara perempuan didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Partisipasi perempuan sebagai bagian dari masyarakat, turut berperan pada gerakan politik dapat maupun pada kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat (Saputra & Hasrin, 2022). Dengan begitu akan berimplikasi secara langsung bagi masyarakat secara luas (Gonzalez-Eiras & Sanz, 2021). Partisipasi politik perempuan diperlukan untuk mengintegrasikan peran gender pada berbagai bentuk kebijakan public sehingga dapat melahirkan perangkat hukum serta perubahan paradigma yang hanya mengakomodir kepentingan kaum perempuan dalam arti biologis tetapi juga mengakomodir perempuan dalam arti feminitas, sehingga terjadi keseimbangan peran gender (Andreoli et al., 2021). Kehadiran perempuan pada kontestasi politik di Indonesia, baik itu pemilihan umum (pemilu) ataupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) di daerah semakin terbuka dan berpeluang untuk diikuti kalangan perempuan. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran perempuan turut serta dalam mewarnai dan meramaikan dinamika perpolitikan di Indonesia (Zamroni, 2013).

Fenomena ini memiliki kecenderungan untuk terus menguatnya Gerakan dan tuntutan serta meluasnya kesadaran akan kesetaraan gender. Tentang pentingnya keterlibatan kalangan perempuan pada ruang-ruang politik. Ruang dan jabatan politik semakin terbuka bagi siapa saja (Finlay & Hopkins, 2019).

Politik tidak lagi dikhususnya untuk laki-laki dan tidak tabu bagi kalangan perempuan. Perihal politik, adalah hak seluruh masyarakat Indonesia, tanpa harus

memandang perbedaan gender. Oleh karena itu, kalangan perempuan saat ini berhak dan potensi untuk kontribusi secara nyata dalam politik (Muhammad et al., 2014). Kendati demikian, dengan banyaknya tokoh perempuan yang terlibat dalam kontestasi politik baik di daerah maupun nasional, tetapi fenomena ini masih saja melahirkan polemik sehingga keterlibatan perempuan masih mengundang diskusi dan perdebatan (Yuspita Widiyaningrum, 2020).

Saat ini telah banyak dijumpai keterlibatan perempuan pada kontes politik Indonesia, seperti kontestasi pemilihan kepala daerah (PILKADA), telah memicu perdebatan yang menarik. Mengingat kurangnya perempuan dalam politik lokal dan nasional, pola ini menunjukkan ada sedikit alasan untuk optimisme. Di Indonesia, semakin jelas bahwa perempuan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan nasional (PILKADA). Tidak diragukan lagi, kehadiran perempuan telah memberi energi dan meningkatkan proses politik di Indonesia (Sumbulah, 2008).

Pada berbagai pemilihan politik dan lokal, publik dihadapkan pada sejumlah besar nama dan tokoh perempuan. Mereka hanya sebagai tokoh politik alternatif yang ingin menyebarkan dan menumbuhkan optimisme menuju kelahiran kembali dan transformasi di komunitas masing-masing. Selain itu, memicu pembicaraan dalam berbagai keadaan dalam dinamika politik lokal. Meningkatnya tren demokratisasi di daerah-daerah dicontohkan dengan munculnya beberapa tokoh politik perempuan di sana (Salim, 2019).

Fakta ini menunjukkan gerakan yang berkembang dan tuntutan untuk kesetaraan gender, serta meningkatnya kesadaran akan masalah ini. Tampaknya pola ini akan terus meningkat sepanjang kampanye pemilu di Indonesia. Sama halnya dengan laki-laki, perempuan memiliki kapasitas dan hak untuk berpartisipasi dalam politik dan memberikan kontribusi. Kantor dan ruang politik menjadi lebih transparan; mereka tidak boleh disembunyikan, hanya diperuntukkan bagi laki-laki, atau dijamah ketika perempuan memegang jabatan publik. Namun, fenomena peningkatan jumlah perempuan yang mencalonkan diri untuk jabatan di daerah telah memicu diskusi, perdebatan, dan kadang-kadang masih menimbulkan pertanyaan, terutama mengenai potensi mereka untuk memajukan demokrasi, mempengaruhi dinamika politik, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan manusia (Azizah, 2016).

Diskusi di atas, terlihat bahwa arena politik semakin terbuka bagi kalangan perempuan. Dengan begitu perempuan harus mempersiapkan diri dengan membangun kesadaran politik. Penelitian ini, akan melihat bagaimana bentuk keterlibatan kalangan perempuan dalam arena politik di Kota Tomohon. Penelitian ini menjelaskan makna politik bagi kalangan perempuan di kota Tomohon. Menafsirkan politik sebagai arena perjuangan bagi kepentingan rakyat umum, khususnya perjuangan untuk kepentingan bagi kalangan perempuan. Partisipasi politik perempuan sangat penting karena akan memperkuat demokrasi. Dengan adanya perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik, maka kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan pandangan dan kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk perempuan. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses politik serta dapat memperkuat representasi dan legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu kalangan perempuan tidak perlu takut berkompetisi dengan kalangan laki-laki. Para perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki seiring dengan berkembangnya zaman. karena pada dasarnya perempuan sendiri mempunyai kemampuan yang setara dengan laki-laki. Di sini, peran pemerintah, masyarakat, dan partai politik sangat penting. Semua pihak harus bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan politik yang kondusif bagi perempuan. Dengan demikian, diharapkan partisipasi politik perempuan dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.

## 2. METODE

Penelitian ini berfokus pada partisipasi politik perempuan di Kota Tomohon. Melihat bentuk dan tantangan perempuan dalam kontestasi politik Kota Tomohon. Peneliti menempatkan aktor politik dalam hal ini calon yang maju dalam kontestasi Pemilihan Umum. Aktor politik akan dianalisis dari profil calon, hal yang terkait latarbelakang, modal sosial, bentuk motivasi calon, modal politik calon, dan bagaimana bentuk dukungan keluarga. Pada penelitian kualitatif, peran peneliti sangat penting, karena dengan penalarannya diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan atau memverifikasi data temuan lapangan. Selain itu, akan digunakan alat bantu, yaitu alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh temuan atau

melakukan verifikasi yang lebih konkrit terhadap fenomena sosial yang diteliti (Miles & Huberman, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi; proses dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data proses penelitian. Teknik observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian tentang perempuan di kota Tomohon yang aktif terlibat dalam konstituensi politik. Dan wawancara, merupakan cara efektif untuk menggali informasi secara langsung melalui penyampaian kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Menurut (Moleong, 2012), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewer) yang menjawab pertanyaan. Menurut (Sugiyono, 2016) tujuan wawancara adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan dalam wawancara ini, namun peneliti juga lebih terbuka dan mencatat apa yang dikatakan informan.

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah kalangan perempuan yang terlibat langsung dalam kontestasi politik di kota Tomohon, elemen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan politik seperti KPU dan Bawaslu kota Tomohon, dan aspek tokoh perempuan di kota Tomohon dan akan berkembang mengikuti kebutuhan penelitian. Wawancara dilakukan di kota Tomohon. Waktu wawancara sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh informan kepada peneliti untuk mewawancarai informan yaitu pada jam kerja pukul 07.00 s/d 16.00 WITA bagi informan yang berada dalam struktur pemerintahan dan pukul 16.00 WITA sampai selesai bagi warga. Oleh karena itu, wawancara dilakukan tidak hanya satu kali karena pada saat-saat tertentu beberapa informan juga mengalami hambatan untuk memberikan informasi lebih lanjut. Untuk itu beberapa informan diwawancarai lebih dari satu kali untuk dimintai keterangan yang akurat dan detail. Selain itu, hal ini dilakukan agar informan merasa tidak terburu-buru sehingga apa yang ingin disampaikannya dapat terungkap dengan jelas dan detail.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terlepas dari beberapa kendala, perempuan memiliki kemampuan dan kapasitas untuk terjun ke dunia politik. Keyakinan konvensional bahwa politik hanya diperintah oleh laki-laki karena dipandang sebagai ranah publik yang membutuhkan akal, perdebatan, dan pemikiran yang kompleks adalah salah satu faktor yang berkontribusi. Selama ini, perempuan dipandang tidak cocok untuk memasuki arena politik karena mereka adalah “punghuni dapur abadi, tidak mampu membuat keputusan yang masuk akal, dan tidak mampu mengambil resiko. Akibatnya, masyarakat secara keseluruhan, termasuk laki-laki dan perempuan telah menciptakan dua kutub berlawanan, dengan menganggap bahwa laki-laki berada di lingkungan politik dan perempuan berada di rumah (*domestic*).

Ini ada hubungannya dengan sosialisasi peran gender. Penjelasan lain adalah bahwa sebagian besar kalangan perempuan dibandingkan laki-laki terhalang untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena kesenjangan sosial budaya dan gender. Oleh karena itu, perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam politik, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang dibutuhkan. Masyarakat tidak percaya, bahwa sangat penting untuk mengajarkan perempuan tentang politik, karena laki-laki masih mendominasi ranah politik dan perempuan masih belum tahu apa-apa tentang hal itu.

Laki-laki sering dianggap dominan dalam politik, dan mereka menetapkan aturan main. menciptakan standar untuk mengevaluasi efektivitas politik. Standar, tujuan, dan kebiasaan manusia, yang memprioritaskan "menang dan kalah," daya saing, dan menentukan bagaimana kehidupan politik diatur. Dari sudut pandang feminis, berpendapat bahwa perempuan harus terlibat politik untuk mengekspresikan pandangan politik mereka. Menentang bentuk institusi dan struktur yang tidak adil. Ini memang sulit karena, menurut "teori kelompok yang diredam,". Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman hidup yang serupa tetapi berbeda dalam cara mereka memandang dunia karena pembagian kerja secara sosial,. Laki-laki selalu mendominasi dalam masyarakat.

#### 3.1 Partisipasi Politik Kaum Perempuan Di Kota Tomohon



Aktivitas politik perempuan di kota Tomohon terus menunjukkan peningkatan. Dari data yang dihimpun pada gelaran PILKADA Walikota Tomohon tahun 2020, tercatat Jilly Gabriel Eman berpasangan dengan Virgie Baker maju sebagai calon walikota dan wakil walikota Tomohon. Jilly dan Virgie merupakan representasi kaum perempuan yang ikut dalam kontestasi PILKADA Walikota Tomohon. Meskipun pada akhirnya pasangan ini belum mampu memenangkan kontestasi namun sejarah kota Tomohon akan mencatat bahwa terdapat perwakilan kaum perempuan millennial yang bertarung secara head to head kaum laki-laki yaitu Carrol Senduk dan Wenny Lumentut.

Untuk anggota legislatif, terdapat 8 (delapan) orang perwakilan perempuan yang menduduki posisi sebagai anggota DPRD kota Tomohon periode 2019-2024 dari 20 orang. Dari data yang diperoleh, perwakilan kaum perempuan hampir merata disetiap daerah pemilihan (Dapil) di Kota Tomohon. Presentasinya terbilang tinggi (40%) jika dibandingkan dengan kota Manado dengan angka 32%. Dengan presentase 40% maka jumlah tersebut telah memenuhi kuota 30% perwakilan perempuan yang telah ditetapkan Undang-Undang. Dengan begitu, kalangan perempuan dapat ikut terlibat secara aktif dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mewakili kepentingan masyarakat kalangan perempuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 56 ayat 2 yang bunyinya *"Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon."* Aturan itu mendorong perempuan di Kota Tomohon untuk mengupayakan segalanya, selama pelaksanaan kampanye dengan menunjukkan kepada pemilih bahwa mereka kualitas untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kota Tomohon. Terpilihnya 8 perempuan di Kota Tomohon menjadi bukti lebih lanjut dari kesempatan ini, menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di DPRD Kota Tomohon menjadi besar dari waktu ke waktu.

Pada aspek penyelenggara PEMILU, juga terdapat perwakilan kaum perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tomohon, dan tercatat 1 orang sebagai anggota/komisioner dan 1 orang sebagai sekretaris KPU Kota Tomohon. Selain itu di tingkat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Tomohon juga

terdapat 1 orang perwakilan kaum perempuan yang tercatat sebagai Anggota BAWASLU Kota Tomohon.

Data di atas menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Kota Tomohon menunjukkan peningkatan. Namun secara kuantitas, kondisi ini belum mencerminkan secara proporsional dan signifikan posisi strategis kalangan perempuan di Kota Tomohon. Namun demikian, peningkatan partisipasi politik perempuan dapat memberikan banyak manfaat bagi kota Tomohon, seperti meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil, mengurangi kesenjangan gender, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Persepsi peran perempuan dalam politik diharapkan terus meningkat, sehingga kesulitan-kesulitan perempuan untuk terlibat bidang politik, seperti norma sosial dan budaya dapat diatasi. Faktor ini menjadi poin penting bagi perempuan untuk menunjukkan eksistensi bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam arena politik local maupun nasional.

Dalam mencapai harapan tersebut, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah kota Tomohon dapat memberikan kebijakan yang mendukung partisipasi politik perempuan, seperti memberikan kuota keterwakilan perempuan di berbagai level pemerintahan, memberikan akses pendidikan dan pelatihan politik, dan memberikan dukungan finansial untuk kampanye politik perempuan.

Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung partisipasi politik perempuan, dengan menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap perempuan yang terlibat dalam politik, memberikan dukungan moral dan finansial, serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik. Selain itu peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga dapat berperan sebagai agen perubahan, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perempuan yang ingin terlibat dalam politik, mengorganisir kampanye kesadaran gender, serta mengadvokasi hak-hak perempuan dalam politik. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan partisipasi politik perempuan di kota Tomohon terus meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan kota Tomohon secara keseluruhan.

### ***3.2. Tantangan Kalangan Perempuan Pada Kontestasi Politik Lokal Kota Tomohon***

Keberadaan perempuan dalam kehidupan masyarakat Tomohon tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan dalam mengambil peran kepemimpinan dan membuat keputusan tentang kebijakan masa depan. Baik pria maupun wanita diberi nama menurut ayah mereka (*fam*) untuk melacak sejarah keluarga mereka. Namun, khusus wanita, nama keluarga (*fam*) akan berakhir. Ketika seorang wanita menikah, nama belakang suami mengambil alih sebagai nama belakang yang baru. Akan tetapi, masyarakat Tomohon yang dominan beretnis Minahasa, tidak membedakan bagaimana pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan; sebaliknya, itu ditentukan oleh persetujuan dan niat pemberi warisan. Realitas budaya egaliter di masyarakat Tomohon, dimana laki-laki dan perempuan diberi status dan kedudukan yang sama dalam struktur sosial. Persamaan ini diharapkan dapat memuluskan jalan para kalangan perempuan untuk dapat ikut bersaing dengan laki-laki dalam kontestasi politik di Kota Tomohon.

Namun, kita tidak bisa cepat-cepat menyimpulkan bahwa tidak ada kendala sosial, budaya maupun ideologi agama yang dialami oleh kalangan perempuan di Kota Tomohon dalam dunia politik, berikut ini akan diuraikan beberapa faktor yang menjadi hambatan kalangan perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam arena politik.

#### *a. Stereotip gender*

Persepsi yang salah bahwa perempuan kurang mampu atau tidak memiliki kemampuan yang sama dengan pria dalam bidang politik. Hal ini dapat membuat perempuan kurang percaya diri dan sulit untuk maju dalam dunia politik. Perempuan enggan berpartisipasi dalam politik karena rendahnya rasa percaya diri dan hukum alam yang memaksa mereka mengurus rumah dan keluarga. Tugas domestik lainnya. Penghalang ini, yang membatasi wanita pada dunia "dapur, kasur, dan sumur", semakin terasa ketika wanita yang sudah menikah merasa sulit untuk mendapatkan persetujuan pasangannya. Selain itu anggapan bahwa perempuan harus bersikap sopan dan menghindari konflik. Hal ini dapat membuat perempuan merasa sulit untuk terlibat dalam debat politik yang sifatnya kontroversial.

Gayatri Chakravorty Spivak melihat kalangan perempuan untuk tampil di ruang publik sering kali terhalang oleh sejumlah faktor (Spivak, 2012). Faktor tersebut mencakup budaya patriarki, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, serta diskriminasi

yang berdasarkan jenis kelamin, kelas, dan ras (Lubis, 2015). Dalam tulisannya yang terkenal, "Can the Subaltern Speak?", Gayatri Chakravorty Spivak menyoroiti betapa pentingnya memberikan suara dan wacana kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa perempuan dalam masyarakat sering kali terjebak dalam situasi yang berbeda-beda dan kompleks, di mana kekuasaan, ekonomi, gender, dan identitas berperan dalam membentuk posisi dan pengalaman mereka (Putri, 2020; Setiawan, 2018).

### ***b. Budaya Patriarki***

Budaya patriarki yang masih kuat, membuat perempuan di kota Tomohon masih merasa bahwa mereka tidak dapat memegang posisi penting dalam politik, sehingga sulit untuk mengambil peran aktif dalam dunia politik. Pada konteks Indonesia yang sebagian besar masih kental dengan budaya patriarki, dimana budaya ini telah diwariskan turun temurun dan dilanggengkan oleh masyarakat. Stereotip ini dapat membuat perempuan merasa tidak cocok untuk terlibat dalam politik, karena mereka merasa bahwa politik adalah urusan pria dan tidak ada tempat untuk mereka. Situasi ini membuat kalangan perempuan merasa bahwa mereka tidak memiliki kontrol dalam politik dan harus menyerahkan keputusan kepada pria. Hal ini dapat membuat perempuan kurang termotivasi untuk terlibat dalam politik.

Spivak menekankan, kesadaran akan peran kebudayaan dan lingkungan sosial dalam menentukan posisi perempuan dalam masyarakat sangatlah penting. Ia menekankan bahwa perempuan dalam masyarakat sering kali diperlakukan sebagai objek, terutama oleh pemerintah dan kekuatan asing lainnya (Suryawati et al., 2021; Yunairi, 2020). Oleh karena itu, penting bagi perempuan dalam masyarakat untuk memperoleh kontrol atas kehidupan mereka dan menjadi subjek perubahan sosial, bukan objek yang diperintah. Kebebasan berekspresi dan partisipasi politik merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan penting untuk memastikan keadilan sosial bagi semua orang. Dibutuhkan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik sangat kritis dan reflektif. Penting untuk menghargai kebudayaan dan lingkungan sosial dalam menentukan posisi dan pengalaman perempuan, serta pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia yang mendasar dan kebebasan berekspresi dalam konteks politik.

### *c. Sistem Politik Nasional*

Meskipun ada kebijakan quota yang menentukan persentase keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Hal ini mengurangi kesempatan bagi perempuan untuk mengambil posisi penting dalam struktur politik dan mempengaruhi kebijakan. Keterbatasan sumber daya dan akses ke sumber daya politik, seperti dana kampanye, dukungan partai politik, dan jaringan politik, dapat membuat perempuan kesulitan untuk terlibat dalam politik. Hal ini terutama berlaku untuk perempuan yang kurang terhubung dengan jaringan politik yang ada di kota Tomohon.

Selain itu dominasi elit politik yang memegang kekuasaan dapat membuat sulit bagi perempuan untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Hal ini karena elit politik cenderung mempertahankan status quo yang telah ada, termasuk kekurangan representasi perempuan di struktur politik. Pada konteks sistem politik, teoritis *feminisme* menyerukan perubahan pada struktur politik yang memperhitungkan pengalaman dan kebutuhan perempuan dan meningkatkan partisipasi politik perempuan (Childs & Krook, 2006). Ini mencakup peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, peningkatan akses perempuan ke pendidikan dan pekerjaan, dan pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial (Matland, 2005).

Perempuan masih menghadapi banyak tantangan dalam berpartisipasi dalam politik (Kassa, 2015). Misalnya, ketidaksetaraan akses ke pendidikan dan pekerjaan, pengabaian kebutuhan perempuan dalam perumusan kebijakan publik, diskriminasi dalam sistem hukum, dan kekerasan politik dan seksual yang ditujukan pada perempuan. Perempuan dilihat sebagai subjek dari perubahan sosial dan politik, bukan hanya sebagai objek dari diskriminasi dan penindasan.

Laki-laki dan perempuan berperilaku setara di depan umum dan khususnya di bidang politik seperti yang terlihat dalam konteks tradisi dan budaya Minahasa. Namun, karena norma-norma patriarki masih mendominasi masyarakat lokal maupun Nusantara, perempuan hampir tidak berdaya dalam situasi ini. Isu kesetaraan gender yang sangat penting dalam kerangka politik demokratis tidak dapat dipisahkan dari dominasi masyarakat patriarki yang masih membudaya. Apakah ada sistem pemilu yang berlaku umum, setiap segmen masyarakat (tanpa

memandang jenis kelamin, etnis, ras, agama, atau latar belakang kelas) harus diberi peluang dalam hal akses ke jabatan publik.

Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia khususnya di Kota Tomohon semakin penting di era reformasi. Sebagai perwujudan dari prinsip kesetaraan politik, beberapa undang-undang politik mulai mempertimbangkan tuntutan keterwakilan perempuan. Perempuan memiliki peluang di bidang politik. Dibutuhkan pendidikan politik yang baik bagi kalangan perempuan. Pendidikan politik akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan tentang bagaimana menggunakan hak mereka untuk memilih. Pendidikan politik adalah praktik yang mencoba membentuk dan mengembangkan ideologi politik masyarakat, seperti yang diketahui. Ini termasuk berpegang pada ide-ide dengan nada politik, seperti kesetiaan dan sentimen politik, serta memiliki informasi dan wawasan politik yang membuat seseorang sadar akan masalah dan sikap politik.

#### **4. KESIMPULAN**

Kehadiran kaum perempuan dalam pentas politik Indonesia menjadi wacana yang penting. Namun demikian masih banyak hambatan perempuan untuk tampil pada kontestasi politik. Tren partisipasi politik kalangan perempuan di Kota Tomohon terus mengalami peningkatan. Hal itu dilihat dari adanya calon walikota dari kalangan perempuan yang maju pada kontestasi PILKADA Kota Tomohon tahun 2019 yaitu pasangan Jilly Gabriel Eman berpasangan dengan Virgie Baker. Di wilayah eksekutif setidaknya terdapat perwakilan 40% perempuan yang menduduki posisi sebagai anggota DPRD Kota Tomohon. Sementara itu di aspek penyelenggara PEMILU, terdapat perwakilan perempuan di KPU dan BAWASLU Kota Tomohon. Kondisi ini tidak serta merta berarti bahwa keterlibatan kalangan perempuan di dunia politik berjalan mulus, namun masih terdapat hambatan-hambatan yang harus dihadapi kaum perempuan dalam berpartisipasi dalam dunia politik di Kota Tomohon.

Meskipun partisipasi politik perempuan telah meningkat, perempuan masih menjadi minoritas di dunia politik. Selain itu, perempuan juga sering menghadapi pelecehan dan intimidasi dalam politik, yang dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi aktif. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah

konkret. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah dengan memberikan lebih banyak dukungan kepadanya, seperti pelatihan dan pendanaan yang diperlukan untuk berkampanye. Selain itu, diperlukan tindakan untuk memastikan bahwa perempuan merasa aman dan terlindungi ketika terlibat dalam politik.

Tantangan terbesar bagi partisipasi politik perempuan adalah kekerasan politik. Perempuan di ruang politik sering mengalami ancaman, pelecehan, atau kekerasan fisik yang diarahkan pada mereka atau keluarga mereka. Hal membuat perempuan merasa tidak aman untuk berpartisipasi dalam politik, bahkan di tingkat lokal. Kekerasan politik dapat menghalangi partisipasi perempuan dan memperburuk ketidaksetaraan gender dalam politik. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, langkah-langkah perlu diambil. Di tingkat nasional, undang-undang dan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender dan inklusivitas politik harus dipromosikan dan diterapkan secara konsisten. Pendidikan politik dan pelatihan juga penting untuk membangun kapasitas perempuan dalam politik

## DAFTAR PUSTAKA

- Althoff, P., & Rush, M. (1972). *Introduction to Political Sociology*. MacMillan Publishing Company.
- Andreoli, F., Manzoni, E., & Margotti, M. (2021). Women at work: Gender quotas, municipal elections and local spending. *European Journal of Political Economy*, 70(December). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102045>
- Azizah, N. (2016). Perempuan Pemenang Pemilu: Studi Perspektif Gender Dan Meluruhnya Budaya Patriarkidi Propinsi Jawa Timur. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 13(2), 153. <https://doi.org/10.24014/marwah.v13i2.886>
- Childs, S., & Krook, M. L. (2006). Should feminists give up on critical mass? A contingent yes. *Politics & Gender*, 2(4), 522-530.
- Finlay, R., & Hopkins, P. (2019). Young Muslim women's political participation in Scotland: Exploring the intersections of gender, religion, class and place. *Political Geography*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102046>
- Fransiskus, E. (2014). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN BELITANG HULU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2010. *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik*, 1(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418%2Faspirasi.v1i1.80>
- Gonzalez-Eiras, M., & Sanz, C. (2021). Women's representation in politics: The effect of electoral systems. *Journal of Public Economics*, 198. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104399>

- Iskandar, Z. (2002). Perilaku Politik Masyarakat di Tujuh Kota Indonesia (Zulriska Iskandar) 78 PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DI TUJUH KOTA INDONESIA. *Jurnal Sosiohumaniora*, 4(2), 78–88.
- Kassa, S. (2015). Challenges and opportunities of women political participation in Ethiopia. *Journal of Global Economics*, 3(4), 1–7.
- Kertati, I. (2014). Implementasi kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan di parlemen. *Jurnal Riptek*, 8(1.2014), 19–32.
- Lubis, A. Y. (2015). Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Matland, R. E. (2005). Enhancing women's political participation: legislative recruitment and electoral systems. *Women in Parliament: Beyond Numbers*, 2, 93–111.
- Miles, M. B., & Huberman, M. B. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode - Metode Baru*. UI-Press.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif (Cet. Ke-30.). *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 93–106.
- Muhammad, M., Ahmad, I., & Kurniawan, S. (2014). Menakar Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Malang. [Http://Dx.Doi.Org/10.26418%2Faspirasi.V1i1.80](http://Dx.Doi.Org/10.26418%2Faspirasi.V1i1.80), 2(1). <https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.513>
- Putri, N. W. E. (2020). Perempuan Hindu Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender. *Communicare*, 1(1), 30–39.
- Salim, C. (2019). Dinamika Politik Perempuan Dalam Kontestasi Pilkada Di Provinsi Lampung. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 03(2), 287–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/tapis.v3i2.1666>
- Saputra, I. P. W., & Hasrin, A. (2022). DEKONSTRUKSI IDEOLOGI FEMINISME PADA KEHIDUPAN PEREMPUAN PESISIR PANTAI HYATT, SANUR-BALI. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 3(2), 95–104.
- Schmitt-Beck, R. (2015). Data Bases and Statistical Systems: Political Behavior and Elections. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 824–829). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.41075-5>
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana.
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 6(1), 12–25.
- Sholikhah, A. (2014). PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA. *Komunika*, 8(1).
- Spivak, G. C. (2012). Subaltern studies: Deconstructing historiography. In *In other worlds* (pp. 270–304). Routledge.
- Suarmini, N. W., Zahrok, S., & Agustin, D. S. Y. (2018). Peluang dan tantangan peran perempuan di era revolusi industri 4.0. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 5, 48–53.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.



- Sumbulah, U. (2008). *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi*. UIN - Malang Press.
- Suryawati, I., Seran, A., & Sigit, R. R. (2021). Perempuan Subaltern Dunia Ketiga dalam Tinjauan Teori Feminisme Poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak. *FOCUS*, 2(2), 88-96.
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang. *Kajian*, 25(1), 19-34.
- UN WOMEN USA. (n.d.). *HeForShe*. Unwomwnusa.Org.
- Unicef. (2015, March 8). *Empowering Women Empowering Humanity*. Unicef.Org.
- Yunairi, D. (2020). Konsep Feminisme Gayatri Chakravorty Spivak dan Upaya Membangun Keluarga Unggul (Kajian Feminisme Modern). *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 11(1), 103-113.
- Yuspita Widiyaningrum, W. (2020). PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(2), 126-142.
- Zamroni, M. (2013). *Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender*. Sunan Kalijaga State Islamic University.